



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PENGUSUTAN PENYEBAB KEBAKARAN RUMAH HAKIM DI MEDAN

**Prianter Jaya Hairi**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[prianter.hairi@dpr.go.id](mailto:prianter.hairi@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Rumah Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Khamozaro Waruwu, terbakar pada Selasa, 4 November 2025. Rumah yang terletak di Komplek Taman Harapan Indah Kota Medan itu terbakar pada saat seluruh penghuni tidak berada di lokasi. Khamozaro Waruwu adalah hakim yang menangani perkara korupsi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara. Ia memimpin sidang untuk dua terdakwa, yakni Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group, Akhirun Piliang, alias Kirun dan Direktur PT Rona Namora Rayhan, Dulasmi Piliang. Sidang keduanya telah memasuki tahap penuntutan.

Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Yasardin, mengungkapkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Medan, Khamozaro Waruwu, sering mendapat teror berupa sambungan telepon misterius sebelum rumahnya terbakar. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya hubungan antara teror yang dialami hakim Khamozaro Waruwu dengan kejadian kebakaran.

Serangkaian peristiwa menimpa hakim dalam beberapa waktu terakhir di tahun 2025 menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan keamanan terhadap diri hakim. Belum lama sebelum peristiwa rumah seorang hakim di Medan terbakar pada November 2025 ini, seorang hakim Pengadilan Agama Batam juga menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal pada Maret 2025.

Komisi Yudisial menyatakan keprihatinan dan berjanji akan mengawal penyelidikan. Namun hingga kini, belum ada kejelasan siapa pelaku dan apa motifnya. Menurut Komisi Yudisial, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah hakim di Indonesia mengalami ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan fisik. Polanya berulang, hakim yang menangani perkara strategis seperti korupsi, agraria, atau politik sering menjadi sasaran. Namun, sistem perlindungan terhadap mereka masih lemah, bahkan nyaris tidak ada.

Berbagai peristiwa yang menimpa hakim tersebut menunjukkan urgensi penguatan kebijakan hukum terkait fasilitas bagi hakim, yang salah satunya ialah mengenai hak jaminan keamanan hakim. Oleh sebab itu, penting untuk terus mendorong adanya penguatan konsep jaminan keamanan bagi hakim melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang saat ini telah masuk menjadi salah satu RUU dalam Daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2026 dari Komisi III DPR RI. Pengesahan RUU ini krusial agar hakim sebagai penegak keadilan dapat menjalankan tugasnya dengan perasaan aman dan jauh dari intimidasi yang dapat memengaruhi independensi hakim.

Komisi III DPR RI juga perlu terus mendesak kepolisian untuk segera mengusut kejanggalan dalam insiden kebakaran rumah hakim Khamozaro Waruwu. Negara wajib menjamin keamanan para hakim. Insiden ini dikhawatirkan sebagai bentuk intimidasi yang mengancam independensi peradilan.

Independensi hakim harus dijaga dan dilindungi karena merupakan fondasi utama penegakan keadilan dan negara hukum, memastikan hakim dapat mengambil keputusan secara objektif tanpa tekanan, ancaman, atau intervensi dari pihak mana pun. Pelindungan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan Hak Asasi Manusia (HAM) terlindungi, dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

## Atensi DPR

Komisi III DPR RI dapat menanggapi kasus terbakarnya rumah hakim yang menangani Tindak Pidana Korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara, yang terkait dengan fungsi pengawasan dan legislasi. Melalui fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI perlu mendorong kepolisian untuk secepatnya mengusut secara tegas jika ada kemungkinan intimidasi terhadap hakim Khamozaro Waruwu. Komisi III DPR RI juga dapat meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk secara khusus membantu hakim Khamozaro Waruwu. Adapun melalui fungsi legislasi, Komisi III DPR RI memiliki peran strategis untuk mendorong pembahasan RUU Jabatan Hakim secara optimal untuk memberikan penguatan fasilitas hakim, utamanya terkait hak jaminan keamanan bagi diri hakim saat menjalankan tugasnya.

Di samping itu, melalui fungsi legislasi, Komisi III DPR RI dapat melaksanakan percepatan penyelesaian pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bersama pemerintah. Salah satu aspek yang mengalami penurunan, yaitu melemahnya sistem peradilan pidana, dapat diatasi dengan mempercepat pembahasan RKUHAP, mengingat rancangan tersebut memuat berbagai ketentuan yang memperkuat perlindungan terhadap hak tersangka, korban, serta kelompok rentan guna meningkatkan penghormatan terhadap HAM dalam proses penegakan hukum pidana. Penyelesaian RKUHAP secara tepat waktu juga menjadi langkah strategis untuk memperbaiki indikator yang menurun sekaligus mewujudkan penguatan hak-hak warga negara dalam berhadapan dengan hukum.

## Sumber

kompas.id, 7 November 2025;  
marinews.mahkamahagung.go.id, 7 November 2025;  
tempo.co, 7 November 2025;  
waspada.co.id, 8 November 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Rafika Sari  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Edmira Rivani  
Hilma Meilani

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikhah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*